



6 Nusantara

Peta RAKYAT
Edisi 691/Tahun XVIII/
27 Februari

Pentingnya Literasi Keuangan Kepada Masyarakat Desa

Oleh : Matdio Sibahaa, SE, MM, CP, NLP, CLMA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Mahasiswa S-3 Konsentrasi Manajemen Keuangan - UNPAK
Bojor, Jawa Barat.

BERDASARKAN hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat desa hanya mencapai 48,43 persen dan inklusinya sebesar 82,69 persen. Tentu angka tersebut masih menjadi kategori di bawah rata-rata dibandingkan di wilayah perkotaan yang sudah mencapai 50,52 persen dengan tingkat inklusi sebesar 86,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang rendah akan literasi keuangannya dan inklusinya sangat tinggi.

Secara bahasa literasi di artikan sebagai tingkat pemahaman, keterampilan, atau pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan secara istilah literasi keuangan itu dipahami sebagai bentuk pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan atau keyakinan yang mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan terhadap manajemen keuangan (Cahyaningtyas et al., 2020). Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa literasi keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses pengetahuan, keterampilan, keterampilan konsumen dan keyakinan konsumen atau masyarakat agar mampu menerapkan pengelolaan keuangan secara lebih baik (Cahyaningtyas et al., 2020).

Ada 4 kategori yang menggolongkan seseorang memiliki tingkat literasi keuangan, yaitu, Well literate, yakni memiliki pengetahuan dasar tentang jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban.

Less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan, baik produk maupun jasa.

Not literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, serta tidak mempunyai keterampilan bagaimana menggunakan produk dan jasa dari lembaga keuangan tersebut.

Adapun indikator untuk mengukur tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan bisa adalah sebagai berikut:

Pengetahuan keuangan, dimana pengetahuan merupakan komponen penting untuk mengukur tingkat literasi seseorang dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan suatu produk dan jasa dari lembaga keuangan. Pengetahuan tersebut dapat memberikan dorongan untuk melakukan keputusan seseorang karena telah mendapatkan informasi yang tepat dan baik.

Perilaku konsumen lah yang pada akhirnya menentukan pembentukan keuangan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Sikap keuangan, point ini fokus pada time horizon responden terhadap yang dan perencanaan keuangan untuk masa depan.

Sedangkan Inklusi keuangan itu sendiri dipahami sebagai suatu kondisi yang efektif dalam masyarakat dan mampu mengakses terhadap kredit, tabungan, serta sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Meskipun menurut BI sendiri inklusi keuangan atau keuangan yang inklusif tidak memiliki definisi yang baku tetapi pada dasarnya inklusi keuangan pun diadopsi sebagai salah satu kondisi yang baik untuk masyarakat.

Dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi menandakan bahwa akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia memadai. Tinggi bagairanya Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan yang bijak terhadap layanan jasa keuangan tersebut.

Adapun indikator pengukuran inklusi keuangan menurut peraturan pemerintah (2016) dijelaskan sebagai berikut:

Ketersediaan/akses lembaga keuangan. Akses atau ketersediaan lembaga keuangan formal digunakan untuk mengukur penggunaan dan keterjangkauan fisik dan harga bagi konsumen.

Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Penggunaan mengukur aktualitas produk dan jasa keuangan.

Kualitas. Untuk mengukur sebuah atribut produk atau jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.

Jadi hipotesis sederhana mengenai hubungan literasi keuangan dengan tingkat inklusi keuangan masyarakat tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Akan tetapi, inklusi keuangan bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana suatu masyarakat sebetulnya sudah terpenuhi secara akses untuk menggunakan layanan jasa keuangan agar digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Tetapi tingkat inklusi keuangan saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman finansial masyarakat. Sehingga konsumen dapat mengambil sikap yang bijak untuk perencanaan keuangan masa depan. Hal ini diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa. Karena pada kenyataannya masyarakat desa sendiri masih terbelak dalam penggunaan yang salah terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang mengakibatkan mereka terbelit dengan hutang dan jatuh dalam kesulitan.

Jadi untuk memahami pentingnya literasi keuangan tidak hanya sekedar untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan saja. Tetapi, lebih jauh yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data diatas tingkat literasi keuangan masyarakat masih lah rendah, meskipun akses terhadap layanan jasa keuangan sudah cukup.

Meskipun tingkat inklusi tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa rendahnya literasi keuangan di masyarakat desa tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga mereka.

Tentu saja ini dipergaruhi juga oleh tingkat pemahaman atas penggunaan akses jasa keuangan yang disalurkan. Untuk itu diperlukan modal sosial untuk menilai persepsi masyarakat terhadap penggunaan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Karena pada dasarnya sikap dan perilaku masyarakatlah yang menentukan pengambilan keputusan keuangan masyarakat yang tepat. (*)

Komisi VI Dorong Optimalisasi Keselamatan dan Layanan Transportasi oleh PT KAI

BANDUNG, Pelita RAKYAT
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zaurina menekankan pentingnya SOP yang komprehensif di PT KAI dan PT Kereta Api Comuter Indonesia, mengingat besarnya jumlah pengguna kereta api yang mencapai 336,47 juta orang hingga November 2023. Hal itu disampaikan Nevi saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat baru-baru ini.

Pada kunjungan kerja Komisi VI DPR RI yang membahas langkah-langkah strategis PT Kereta

Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Api Comuter Indonesia dalam meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang tersebut. Nevi sempat mengutarakan pandangannya tentang persiapan PT KAI menjelang Idul Fitri dan dukungan pemerintah terhadap BJB Kertajati, termasuk upaya mendukung UMKM terbelit di lingkungan bandara.

"Peningkatan SOP tidak hanya tentang pencegahan kecelakaan, tetapi juga tentang memastikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi penumpang," ujar Nevi di Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Mengenai Idul Fitri, Nevi sangat berharap PT KAI meningkatkan kualitas layanan dengan terus memberikan yang terbaik pada penumpang.

"Kami tidak ingin ada lagi calo tiket atau gangguan kereta. Prioritas kami adalah menyediakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi para pemudik," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Sementara terkait dukungan pemerintah pada BJB Kertajati



putri Nabu ekonomis regional, Nevi Nevi, (dep/aha/parle/r)

TASIKMALAYA, Pelita RAKYAT Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggelar Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh 20 Perangkat Daerah terdiri dari badan dan dinas di Pemkab Tasikmalaya di mulai tanggal 19 s.d. 26 Februari 2024.

Forum Perangkat Daerah ini diselenggarakan di masing-masing aula perangkat daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum antar pelaku pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.



Forum Perangkat Daerah ini diselenggarakan di masing-masing aula perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Gelar Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Kepala Bappedel Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Koordinator pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Rudi Sonjaya menyampaikan Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan untuk penyusunan program di tahun yang akan datang. "Alhamdulillah saat ini kami sedang menyusun untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. Forum Perangkat Daerah sebagai salah satu tahap



Forum Perangkat Daerah ini diselenggarakan di masing-masing aula perangkat daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Jajaran Akan Terbuka Terhadap Kritik

SUKADANA/LAMTIM, Pelita RAKYAT
Dalam Rangka Membangun Transformasi Digital Keajaiban RI Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan meningkatkan profesional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Senin (26/2/2024) Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo membuka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan MoU PWI Lampung Timur dan MoU PWI Lampung Timur dan MoU PWI Lampung Timur, bertempat di balai wawaran sekretariat PWI Lampung Timur.

Dalam sambutan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo mengungkapkan "Semoga kedepan lebih profesional dan mampu menjadikan suatu berita sebagai media komunikasi, antara wartawan dan masyarakat. Pemerintah mendukung ekosistem pers yang adaptif, dengan tetap menghormati kebebasan pers."

Kami berharap kepada seluruh insan pers, agar menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, serta mematuhi kode etik wartawan Indonesia. Untuk itu saya tegaskan, bahwa



Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan jajaran, akan selalu bersikap terbuka terhadap kritik.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Agustinus Ba'ka Takdilitung SH, MH, menjelaskan bahwa MoU yang ditandatangani dengan PWI Lampung Timur, akan dilaksanakan secara profesional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Semoga hubungan yang baik ini, bisa terus ditingkatkan, karena peran insan media sangat penting khususnya untuk menyampaikan informasi kinerja instansi Kejaksaan Negeri Lampung Timur, diruang publik," jelas Kepala Lampung Timur. (Diskominfo/Safaruddin)

Webinar ASN Belajar Jangka 1,5 Juta, Pj Gubernur Adhy : Komitmen Pemprov Jatim Hasilkan ASN Unggul Berkualitas

JATIM, Pelita RAKYAT
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karjono mengapresiasi antusiasme peserta webinar Aparatur Sipil Negara (ASN) Belajar yang digelar oleh Grup Pj SDC's Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur. Sampai saat ini, webinar tersebut telah menjangkau sebanyak 1.527.584 peserta dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan data peserta dari multipatform baik yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting maupun YouTube BPSDM Jatim, Pj Gubernur Adhy menjelaskan bahwa di tahun 2022 Webinar ASN Belajar memproduksi 49 seri dengan durasi 401.482 ASN. Kemudian di sepanjang tahun 2023 webinar ASN Belajar memproduksi 44 seri dengan penonton yang meningkat lebih dari dua kali lipat mencapai 949.080 ASN.

"Terbukti tahun 2023 pesertanya meningkat signifikan, artinya memang program ini sangat baik dan mendapatkan atensi positif dari ASN seluruh Indonesia," ujarnya di Gedung Negara Grahaadi, Kamis (22/2/2024).

Khusus tahun 2024 ini, lanjut Adhy, Webinar ASN belajar telah menghasilkan 7 seri dengan penonton mencapai 179.022 selama periode Januari - Februari. Ia pun optimis sampai akhir tahun penonton program ini akan semakin meningkat dengan syarat konten-konten video yang dibuat juga semakin menarik dan sesuai dengan kebutuhan ASN saat ini. Tentu ini harus didukung dengan materi-materi yang relevan, isu-isu yang membahas tantangan-tantangan ASN ke depannya," katanya.

Program ASN Belajar ini, menurut Pj Gubernur Adhy, adalah bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan terbelatnya banyak materi yang bermanfaat untuk kehal ASN saat menjalankan tugasnya. "Saya rasa itu adalah program yang sangat baik bagi ASN, karena mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka, jalan-jalan kerja profesional yang baru diajarkan," katanya.

Pj Gubernur Adhy menambahkan, Jawa Timur menaruh sangat concern dalam upaya mengembangkan kompetensi ASN. Hal ini dibuktikan dengan pengurangan kompetensi ASN. Hal ini dibuktikan dengan pengurangan kompetensi ASN. Hal ini dibuktikan dengan pengurangan kompetensi ASN.

Pj Gubernur Jatim ini juga mengatakan bahwa di kerangka tahun Gubernur Jatim 2019-2024 Klafidat Indes (Kerangka) sangat memuat perhatian dalam pengembangan kompetensi SDM ASN di Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa berfokus pada proyek-proyek perubahan dan inovasi. "Ini Klafidat menyampaikan adanya bisa menghadapi tantangan masa depan maka setiap ASN harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan ASN Jatim

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Gelar Operasi Pasar Murah

Eti Sumarti, salah satu warga Kecamatan Sariwangi menyampaikan terima kasih kepada